

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Anriani, Stepi, *Intelijen dan pilkada*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Djulaeka, and Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003)
- Hasibuan, Malayu S.P, *Organisasi dan Manajemen*, (Rajawali Press, 2004)
- Huda, Nimatul, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Ilham Prisgunanto, S. S, *Komunikasi & Polisi: Edisi Tiga Community, Citra, Bias Selebritas, Digital*, (Jakarta: Prisani Cendekia, 2015)
- Moh, Mafud, *DEMOKRASI DAN KONSTITUSI DI INDONESIA*, (Jakarta: Penerbit PT RINEKA CIPTA, 2003)
- Prakosa, Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Ronny, Hanitijo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1988)
- Rousseau, Jean Jacques, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)
- Sholahuddin, Abdul Hakam, et al. *Hukum Pemilu di Indonesia*. (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023)
- Sodikin. *HUKUM PEMILU Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. (Bekasi : Penerbit Gramata Publishing, 2014)
- Tinangon, Meidy, dkk, *Membumikan Electoral Justice Dalam Pilkada*, (Manado: KPU Provinsi Sulawesi Utara, 2021)

Jurnal

Bastian, Anib, Rustam Hs. Akili, yusrianto Kadir, “Netralitas Kepolisian Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(2), 2024, 103, <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i2.3721>

Benuf Kornelius dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* 7, no.1, 26, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Eriton M, ‘Pengoptimalan Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Faktual Pada Pencalonan Kepala Daerah’ , *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 2(1), 54-73, <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v2i1.7175>

Huda, Ni’matul, “Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2, no.21, 2016, 225, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art3>

Kaesmetan, Ori Tri Hapsari. "Studi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan", *Journal KPU I*, 2019, 1-5.

Muhammad, Arif, "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang kepolisian”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 2021.

Siregar, Sarah Nuraini. "Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 16. no.1, 2019, 98, <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.777>.

Sugiri, “Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan”, *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no.3, 2023, 8, <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.417>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 Tentang Peran tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Website atau Media Internet

Fauzan, “Diduga Ikut Deklarasi Cabup Bone, 2 Perwira Polda Sulsel Diperiksa Propam”, *Liputan* 6, 19 September 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5705895/diduga-ikut-deklarasi-cabup-bone-2-perwira-polda-sulsel-diperiksa-propam?page=2>, diakses pada 2 Agustus 2025.

Kamus

KBBI, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Online, diakses pada 9 Juli 2025.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan dengan Bapak AKBP. Eko Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jateng

1. Apa yang dimaksud dengan netralitas dari perspektik kepolisian?
2. Apa-apa saja unsur dari netralitas kepolisian?
3. Bagaimana tugas dan kewenangan kepolisian dalam menjaga netralitas terhadap kegiatan politik?
4. Bagaimana kewenangan dan peran dari kepolisian terhadap pelaksanaan pemilihan umum, yakni kepala daerah?
5. Bagaimana bentuk netralitas kepolisian jawa tengah terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah?
6. Bagaimana kewenangan dari kepala kepolisian dalam menjaga dan menjamin netralitas kepolisian jawa tengah terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah?
7. Bagaimana Kepolisian Jawa Tengah memastikan bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tidak berpihak kepada salah satu kandidat atau partai politik?
8. Langkah apa saja yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam memastikan setiap anggota kepolisian menjalankan tugas serta menjaga netralitas dalam kegiatan politik atau sosial, terkhususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah?
9. Apakah dari Polda Jawa tengah memiliki kode etik tersendiri terhadap anggota kepolisian dalam menjaga netralitas atau ketidakberpihakan kepolisian terhadap kegiatan politik?
10. Apakah di Polda Jawa Tengah terdapat kasus polisi yang melanggar netralitas kepolisian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah?
11. Bagaimana Langkah dari Polda Jawa Tengah mengatasi dan menangani

kasus keterlibatan salah satu polisi yang tidak netral dalam kegiatan politik?

12. Bagaimana sinergitas Kepolisian Jawa Tengah terhadap penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dalam menjaga netralitas dan keamanan pemilihan?
13. Bagaimana sinergitas dari Kepolisian Jawa Tengah terhadap masyarakat sipil dalam menjamin netralitas dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah?
14. Apa saja hambatan atau kendala dari Polda Jawa Tengah dalam menjaga netralitas atau ketidakberpihakan kepolisian Jawa Tengah kepada pasangan calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah?
15. Bagaimana solusi dari Polda Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan dalam menjaga netralitas atau ketidakberpihakan kepolisian Jawa Tengah kepada pasangan calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antarius Sunarya
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50075
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.diponegoro.ac.id Pos-el: info@live.undip.ac.id

Nomor : 98 /UN7.F1/AK/VI/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Yth. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Utk. Bidang Humas Polda Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.1, Mugassari, Kec.Semarang Selatan.,
Kota Semarang, Jawa 50142

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Brian Christian Saragih
NIM : 11000121130239
Alamat : Jln. Timoho Barat III No.35 Semarang
Nomor HP : 081364307599
Bidang minat : Hukum Tata Negara
Judul skripsi : Netralitas Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP.196711191993032002

Dokumentasi Penelitian di Polda Jawa Tengah



